

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antara Negara dengan Negara dan atau Negara dan aktor non Negara merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan bernegara.¹ Terdapat beberapa jenis konflik yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sipilnya, sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara masyarakat sipil. Dari kedua jenis konflik ini, tidak semua merupakan konflik bersenjata. Konflik bersenjata ada berbagai macam, ada yang perang dan bukan perang, sekarang ini dibagi atas internasional dan non-internasional.

Konflik bersenjata merupakan suatu fenomena yang ada dalam peradaban manusia sejak dulu bahkan sampai saat ini. Konflik bersenjata sendiri menurut Pietro Verri merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu:

- 1.) Dua negara atau lebih
- 2.) Suatu negara dengan suatu entitas bukan-Negara
- 3.) Suatu negara dan suatu pihak pemberontak
- 4.) Dua kelompok etnis yang berada di dalam suatu negara²

Konflik bersenjata selalu menimbulkan ketidaknyamanan dan selalu menimbulkan korban. Begitu juga dengan perang yang penuh dengan tindakan kebiadaban sehingga memakan banyak korban jiwa. Untuk mengurangi dan meringankan penderitaan manusia akibat perang, maka perang harus diatur dalam sebuah peraturan. Pada awalnya, hukum yang mengatur tentang konflik bersenjata

¹ Y. P. Suratman, 2017, "Taksonomi Konflik-Konflik Internal di Indonesia sebagai Potensi Perang Proxy," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 7, Vol. 7 No. 1, hlm. 39-52.

² Arlina Permanasari, 2008, Apa Arti Konflik Bersenjata?, <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata/>, diakses 4 November 2018.

disebut hukum perang, dalam perkembangannya sekarang telah dipakai istilah hukum humaniter.³

Ada beberapa perbedaan pendapat antara para ahli hukum internasional tentang pengertian hukum humaniter. Haryomataram, J. G. Starke, dan Sugeng Istanto menyatakan bahwa hukum perang itu sama dengan hukum humaniter dan hukum humaniter merupakan nama baru dari hukum perang. Ahli hukum internasional yang lain seperti Mochtar Kusumaatmadja, dan Geza Herzegh menyampaikan pengertian yang berbeda yakni hukum perang itu tidak sama dengan hukum humaniter namun hanya merupakan ketentuan tentang perlindungan korban perang.⁴ Menurut pendapat penulis yang sesuai dipakai sebagai arti dari Hukum Humaniter yaitu, pengertian yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dimana Hukum Humaniter itu berfokus kepada perlindungan korban perang saja untuk penulisan hukum ini terhadap kasus yang penulis ambil.

Hukum humaniter mula-mula berkembang dalam bentuk hukum kebiasaan. Namun, pada awal abad 19, kebiasaan-kebiasaan tersebut mulai dituangkan dalam Hukum perjanjian internasional tertulis, sehingga sekarang ini dapat dikatakan traktat perjanjian internasional memainkan peran penting sebagai sumber hukum humaniter. Di antara perjanjian-perjanjian internasional dalam hukum humaniter yang terpenting adalah Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Berlakunya Konvensi Den Haag (KDH 1989/1907) dapat terlihat dalam pasal 2 KDH 1907 dimana konvensi hanya berlaku terhadap pihak yang bertikai yang terikat dengan konvensi, sedangkan berlakunya Konvensi Jenewa terdapat dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 (KJ 1949) yang mengatur bahwa Konvensi ini berlaku untuk “perang yang diumumkan, pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui, dan dalam hal pendudukan..” Konvensi ini juga berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan non internasional, aturannya terdapat dalam pasal 1 dan pasal 3.

³ Mochtar Kusumaatmadja dalam Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit ICRC, Jakarta.

⁴ Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit ICRC, Jakarta, hlm. 9-10.

Perbedaan pokok antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa, di mana dalam konflik bersenjata internasional, kedua pihak yang bersengketa memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Dalam konflik bersenjata non-internasional status kedua pihak yang bersengketa tidaklah sama, di mana pihak yang satu berstatus negara, sedangkan pihak lain adalah satuan bukan negara (*non-state entity*).”

Konflik bersenjata non-internasional sering diidentikkan dengan pemberontakan atau gerakan separatisme.⁵ Separatisme merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh para aktor non-negara, melalui segala bentuk aktivitas yang merongrong dan mengganggu, yang berakibat mengancam integritas wilayah dan kedaulatan, serta kelangsungan dan masa depan Negara. Konflik bersenjata non-internasional, dengan demikian, mengacu pada situasi kekerasan yang melibatkan konfrontasi bersenjata yang berlarut-larut antara pasukan pemerintah dan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisir, atau antara kelompok-kelompok itu sendiri, yang timbul di wilayah Negara.⁶

Salah satu konflik bersenjata non-internasional yang mendapat perhatian dunia saat ini adalah konflik antara Pemerintah Turki dan Kurdi. Konflik terjadi antara Pemerintah Turki dan beberapa kelompok milisi. Kelompok milisi utama adalah Partai Pekerja Kurdistan atau yang disebut dengan PKK (dalam Bahasa Kurdi: *Partiya Karkerên Kurdistan*).⁷ PKK berupaya menciptakan negara Kurdi merdeka di Turki Tenggara dan bagian negara-negara tetangga yang dihuni oleh Kurdi.⁸ Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah Ocalan, Zubeyir Aydar dan Murat Karayilan.⁹ PKK dianggap sebagai kelompok teroris oleh Pemerintah Turki,

⁵Nainggolan, P. P. 2014, “Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua”, *Jurnal Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI*, Kajian Vol. 19, Nmr. 3. hlm. 185.

⁶ ICRC, *Internal conflicts or other situations of violence-what is the difference for victims?*, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm>, diakses 5 September 2018.

⁷ <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/pkk.htm>, diakses 27 Maret 2019.

⁸ Bruno G., 2007, Inside the Kurdistan Workers Party (PKK), <https://www.cfr.org/backgrounder/inside-kurdistan-workers-party-pkk>, diakses 27 Maret 2019.

⁹ Refworld, 2007, Turkey: Status of the Kurdistan Workers' Party (PKK) and Turkish Hezbollah; situation and treatment of members, supporters and sympathizers of these parties (2006-2007), <https://www.refworld.org/docid/46fa537528.html>, diakses 27 Maret 2019.

Amerika Serikat dan Uni Eropa.¹⁰ Menurut Breau, suatu kelompok dapat disebut teroris tetapi tetap menjadi peserta dalam konflik bersenjata, karena itu tetap terikat dengan Hukum Humaniter Internasional.¹¹

Dalam konflik antara Pemerintah Turki dan PKK, Turki merupakan suatu Negara yang berdaulat dan PKK adalah aktor non Negara. Populasi Kurdi menyumbang sekitar 14 juta dari total populasi Turki yang berjumlah 80 juta penduduk, meskipun beberapa kelompok Kurdi menyebutkan jumlahnya 20 juta-25 juta. Di seluruh dunia diperkirakan ada 26 juta-36 juta orang Kurdi, dengan banyak yang tinggal di negara-negara Timur Tengah Iran (6 juta-8 juta), Irak (6 juta-6,5 juta) dan Suriah (1,5 juta-2,2 juta).¹² Konflik Turki dan PKK diperkirakan telah menewaskan sekitar 30.000-40.000 orang sejak terjadinya konflik bersenjata pada tahun 1984.¹³

Pihak Turki tidak mengakui bahwa tindakan mereka merupakan sengketa bersenjata. PKK di anggap sebagai pelaku kejahatan oleh Pemerintah Turki dan tidak diakui sebagai pihak yang berperang. Hal ini menjadikan konflik tersebut sebagai perang yang tidak sah, namun dalam KJ 1949 ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa konvensi harus tetap dihormati walaupun perang itu bersifat tidak sah dan konvensi ini tetap berlaku asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 2. Dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, kelompok bersenjata Kurdi harus tetap dilindungi karena merupakan pihak yang bersengketa dalam konflik bersenjata non-internasional. Dari penjabaran tersebut maka dapat dilihat bahwa konflik bersenjata antara pemerintah Turki dan PKK memenuhi konflik bersenjata non-internasional.

Dengan adanya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 hak-hak dari bangsa Kurdi, terlebih penduduk sipil, dan militan yang terluka harus mendapatkan hak-hak

¹⁰ Crisis Group, 2019, Turkey-PKK Visual Explainer, <https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer>, diakses 1 Maret 2019.

¹¹ Breau, S. C., The situation in south-east Turkey: Is it an armed conflict for the purpose of international humanitarian law?, http://campacc.org.uk/uploads/seminar_breau2.pdf, diakses 27 Maret 2019.

¹² RFE/RL, 2013, Facts and Figures: Kurdistan Worker Party, <https://www.rferl.org/a/profile-history-pkk-kurdish/24935503.html>, diakses 12 Maret 2019.

¹³ Mandiraci, B., 2016, Turkey's PKK Conflict: The Death Toll, <https://reliefweb.int/report/turkey/turkey-s-pkk-conflict-death-toll>, diakses 1 Maret 2019.

dasar ini, karena dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang. Terlebih lagi tujuan hukum humaniter adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil, mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas yang dikenal dengan asas perikemanusiaan, dan juga menjamin hak asasi manusia bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh dimana mereka harus dilindungi dan diperlakukan sebagai tawanan perang, sehingga dilihat dari tujuannya, hukum humaniter erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah:

“Ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional apa saja yang dapat diterapkan dalam perlindungan terhadap korban konflik bersenjata antara pemerintah Turki dan PKK?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana Hukum Humaniter Internasional dapat diterapkan dalam perlindungan korban konflik bersenjata antara pemerintah Turki dan PKK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Humaniter Internasional terutama berkaitan dengan temuan kesenjangan antara Hukum Kebiasaan dan kesepakatan internasional yang tertuang dalam KJ 1949 dan Protokol II/1977 serta implementasinya dalam konflik bersenjata non-internasional antara pemerintah Turki dan PKK.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bahwa penulis maupun mahasiswa Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Internasional dapat memperoleh pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional pada umumnya serta implementasinya;

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan permasalahan Implementasi Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional antara Pemerintah Turki dan PKK ini, belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis. Sebagai perbandingan dikemukakan 3 penulisan hukum yang berkaitan dengan topik ini, antara lain:

1. Skripsi

a. Judul Skripsi:

Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama Mahasiswa : Schertian Tony Hadinata Ndolu
- 2) NPM : 100510458
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional?

d. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011.
- 2) Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

e. Hasil Penelitian:

Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011 yaitu Dewan Keamanan berwenang memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan mengadakan sidang dan berunding mengenai situasi di Libya. Dewan Keamanan berwenang menentukan konflik non-internasional Libya yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan mengadakan penyelidikan serta penyelesaian menurut hukum melalui ICC (*International Criminal Court*). Dewan Keamanan PBB berwenang memutuskan tindakan yang harus diambil untuk penyelesaian konflik di Libya dengan mengeluarkan keputusan berupa Resolusi Nomor 1970 dan 1973 yang menyatakan *arm embargo*, *travel ban*, *asset freeze*, *protected civilians*, dan *no fly zone* terhadap Libya. Dengan Resolusi yang telah disebutkan terutama mengenai *protected civilians*, Dewan Keamanan PBB melalui NATO melakukan intervensi terhadap Libya yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan daerah pemukiman sipil dari serangan atau ancaman serangan.¹⁴

2. Skripsi

a. Judul Skripsi:

Analisis Keberlakuan Ketentuan *Geneva Conventions Relative to The Treatment of Prisoners of War 1949* serta *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984* terhadap Penyiksaan atas Tawanan Terduga Teroris.

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama Mahasiswa : Dwita Ayu Hapsari
- 2) Program Studi : Ilmu Hukum
- 3) Universitas : Universitas Indonesia

c. Rumusan Masalah:

¹⁴ Schertian Ndolu, 2016, Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 1) Bagaimana keberlakuan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya *Geneva Convention relative to The Treatment of Prisoners of War* terhadap tawanan terduga teroris?
- 2) Bagaimana ketentuan yang terdapat di dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* memberikan perlindungan terhadap penyiksaan yang dialami tawanan terduga teroris?
- 3) Bagaimana analisis dari pelaksanaan ketentuan perlindungan terhadap tawanan terduga teroris di penjara Guantanamo?

d. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana keberlakuan *Geneva Convention relative to The Treatment of Prisoners of War* terhadap tawanan terduga teroris.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap penyiksaan yang dialami tawanan terduga teroris mengacu pada *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
- 3) Mengetahui perlindungan apa yang didapatkan oleh tawanan terduga teroris di penjara Guantanamo.

e. Hasil Penelitian:

- 1) Pihak AS memberi status kepada tawanan terduga teroris sebagai *enemy combatant* (tentara musuh) yang sebenarnya tidak berhak mendapat perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III. Ketentuan dalam konvensi ini yang diberlakukan untuk tawanan perang terduga teroris adalah dalam pasal 5 yang menentukan bahwa terhadap tiap orang yang belum mendapatkan kepastian terhadap statusnya, haruslah diberikan perlindungan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Konvensi Jenewa III sampai ia mendapat suatu putusan dari proses pengadilan yang adil.

- 2) Bentuk-bentuk perlindungan yang terdapat dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* terhadap tawanan terduga teroris terdiri dari adanya ketentuan-ketentuan mengenai tanggung-jawab negara dalam hal melindungi tiap orang yang berada di dalam penahanan serta peran dari *Committee against Torture* (CAT) dalam menerima laporan dari Negara Pihak mengenai penyiksaan yang terjadi di wilayahnya, dalam hal ini penjara Guantanamo. Ada juga perlindungan dari Konvensi ini yaitu terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan dalam Konvensi ini tidak ada hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan suatu tindakan penyiksaan. Walaupun tindakan penyiksaan itu berasal dari pemerintah penguasa, presiden sekalipun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan tindakan penyiksaan.
- 3) Pernyataan dari pihak AS bahwa seluruh tawanan terduga teroris merupakan *enemy combatant* berujung pada tidak terlaksananya perlindungan dalam Konvensi Jenewa III. Penyiksaan tetap dilakukan oleh militer AS kepada tawanan perang diduga teroris dengan alasan untuk mencapai tujuan meraih informasi sedalam-dalamnya untuk menghancurkan terorisme yang diperintah oleh Presiden. Dari fakta-fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa pihak AS benar-benar mengabaikan segala aspek Hukum Humaniter Internasional dalam perlakuannya pada tawanan terduga teroris.¹⁵

3. Skripsi

a. Judul skripsi:

Aceh Sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998)

¹⁵ Dwita Ayu Hapsari, 2013, Analisis Keberlakuan Ketentuan Geneva Conventions Relative to The Treatment of Prisoners of War 1949 serta Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 terhadap Penyiksaan atas Tawanan Terduga Teroris, Universitas Indonesia.

b. Identitas penulis:

- 1) Nama : Asteria Herbani
- 2) NPM : 09406241037
- 3) Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta
- 4) Program Studi : Pendidikan Sejarah

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah situasi dan kondisi Aceh sebelum dijadikan Daerah Operasi Militer tahun 1989-1998?
- 2) Bagaimanakah proses terjadinya Daerah Operasi Militer di Aceh tahun 1989-1998?
- 3) Bagaimanakah dampak diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Aceh pada tahun 1989-1998?

d. Hasil Penelitian:

- 1) Presiden Soekarno menjuluki Aceh sebagai daerah modal dan menjanjikan diterapkannya syariat Islam di Aceh, karena Aceh sepakat mengumpulkan dana demi perjuangan menjaga keutuhan Tanah Air, pada saat Aceh masih dibawah kepemimpinan Teungku Daud Beureueh. Tapi apa yang dijanjikan Soekarno tidak ditepati, justru Aceh kemudian dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatra Utara dan Daud Beureueh disingkirkan dari Pemerintahan. Kekecewaan ini menghasilkan pemberontakan dengan memberi dukungan terhadap gagasan Negara Islam Indonesia (NII). Pemberontakan ini dapat diakhiri pada tanggal 26 Mei 1959 ketika Aceh diberikan status Daerah Istimewa dengan otonomi luas, terutama dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk memberikan Aceh status Daerah Istimewa dan penerapan Syariah Islam, namun janji tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya. Di lain pihak Presiden Soeharto memberikan kesempatan kepada perusahaan multi nasional dari Amerika Serikat untuk membuka industri besar di Aceh di bidang eksplorasi minyak dan gas di Arun pada tahun 1970-an.

Pemberontakan di Aceh kembali muncul dengan nama baru Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Hasan Tiro.

- 2) Pada akhir tahun 1989 Gerakan Aceh Merdeka muncul dengan kekuatan yang lebih besar dengan diawali kegiatan pengiriman 800 pemuda Aceh ke Libya. Kembalinya pemuda-pemuda ke Aceh pada tahun 1989 mulai menimbulkan gangguan keamanan yang kemudian menjadi kekhawatiran pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan terutama di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Gubernur Aceh Ibrahim Hasan kemudian meminta kekuatan militer untuk menanganinya. Pemerintah pusat Indonesia menjawab laporan tersebut dengan meningkatkan kekuatan personil militer dari 6.000 personil menjadi 12.000 orang. Semenjak tahun 1989 itu pula, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Diberlakukannya DOM di Aceh dengan sandi militer Jaring Merah ditangani oleh Kodam I/ Bukit Barisan.
- 3) Diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Aceh dengan sandi militer Jaring Merah ditangani oleh Kodam I/ Bukit Barisan. Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, kasus Aceh mulai terkuak dan menimbulkan banyak protes keras. Pada tanggal 7 Agustus 1998, Jenderal Wiranto atas ijin Presiden Habibie, mencabut status DOM di Aceh dan menarik seluruh pasukannya dari Aceh.¹⁶

F. Batasan Konsep

1. Istilah hukum humaniter menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu bagian dari hukum yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.¹⁷

¹⁶ Asteria Herbani, 2014, *Aceh Sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998)*, Universitas Negeri Yogyakarta.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

2. Konflik Bersenjata Internal menurut Protokol II/1977 tentang Sengketa Bersenjata Non-Internasional adalah suatu situasi dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed group*), atau pertempuran antara faksi di suatu negara.¹⁸
3. Penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran karena bukan merupakan kombatan.¹⁹
4. Kombatan adalah orang-orang yang berhak ikut serta secara langsung dalam pertempuran atau medan peperangan, yang dapat dijadikan sebagai kombatan adalah angkatan bersenjata resmi (*reguler*) termasuk juga kelompok bersenjata pemberontak namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁰
5. *Belligerent* adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata, dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak (*rebels*).²¹
6. *Insurgency* diawali dengan adanya pemberontak yang merupakan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan (*rebellion*), diakui ada dan memperoleh legal personality, karena adanya pengakuan tersebut, maka kemudian diberikan pengakuan sebagai insurgent (*recognition of insurgency*), yang menyebabkan serta melakukan peperangan internal dengan pihak pemerintah berkuasa yang sah.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit ICRC, Jakarta, hlm. 139.

¹⁹ Arlina Permanasari, 2008, Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Hukum Humaniter, <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/>, diakses 16 Maret 2019.

²⁰ Arlina Permanasari, 2008, Siapa Sajakah Kombatan?, <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/03/siapa-sajakah-kombatan/>, diakses 7 November 2018

²¹ Abhimantra Hertambang, 2007, Pengaturan Umum Tentang Belligerent Dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional, Universitas Atma Jaya Jakarta.

²² *Ibid.*

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Soekanto dan Mamudji menyebut jenis penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²³ Penelitian ini juga memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama, yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini.

2. Sumber Data

Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder meliputi bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hal penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dsb.), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dsb.).²⁴ Berdasarkan penjelasan ini, sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer:

- 1.) Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Tata Cara dan Alat Berperang
- 2.) Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang
- 3.) Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional
- 4.) Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

²³ Soekanto dalam Susanti dan Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

²⁴ *Ibid.*

- 1.) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet.
- 2.) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.
- 3.) Hasil wawancara dengan narasumber.
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
3. Cara Pengumpulan Data
 - a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - b. Wawancara dengan narasumber
Bapak Christian Donny Putranto, selaku legal adviser yang memberikan informasi mengenai hal yang diteliti penulis dari ICRC (*International Comittee of The Red Cross*).
 - c. Lokasi Penelitian
 - 1) Lokasi Penelitian berada di Jakarta Selatan, tepatnya di perpustakaan ICRC Jl. Iskandarsyah 1 No. 14 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.
 - 2) Lokasi penelitian kedua di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Metode Analisis Data
Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran.
5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan penulis yaitu metode berpikir deduktif, yang artinya berdasar pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari 8 (delapan) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni sub bab pertama tinjauan umum hukum humaniter internasional, sub bab kedua tinjauan umum konflik bersenjata non-internasional Pemerintah Turki dan PKK, dan pada sub bab ketiga implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional antara pemerintah Turki dan PKK.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan hukum/skripsi ini serta saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan dan juga merupakan sumbangan pemikiran dari penulis tentang implementasi hukum humaniter dalam konflik bersenjata non-internasional antara pemerintah Turki dan PKK.